

Masalah sosial kemiskinan di Indonesia: Suatu pandangan teoritis Karl Marx

Daniel*¹, Yohanes Bahari¹

¹ Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

Email: f2281231001@student.untan.ac.id; yohanes.bahari@fkip.untan.ac.id

Naskah diterima: 4/3/2024; Disetujui: 30/4/2024; Dipublikasikan: 3/6/2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji masalah sosial kemiskinan yang terjadi di Indonesia dengan analisis teoritis pandangan Karl Marx, tokoh sosiologi klasik. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, dengan mengumpulkan berbagai referensi yang kredibel dan akurat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan bisa timbul dari sejumlah faktor, termasuk tingkat pendidikan yang rendah, ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan, dan kendala akses terhadap modal. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut diakui sebagai penyebab utama dari masalah kemiskinan. Perspektif teoritis Karl Marx, yang menyoroti akar masalah struktural dalam ekonomi kapitalis, terutama terkait dengan eksploitasi pekerja dan ketidaksetaraan distribusi kekayaan, dapat menjadi pemicu terjadinya kemiskinan. Upaya untuk mengatasi kemiskinan melibatkan beberapa solusi, seperti memberdayakan pekerja melalui pembentukan serikat pekerja, melakukan reformasi struktur ekonomi dengan menerapkan pajak progresif, dan mengalokasikan ulang sumber daya ekonomi ke sektor-sektor yang mampu memberdayakan. Selain itu, investasi dalam bidang pendidikan dan pelatihan pekerja dianggap krusial untuk meningkatkan kualifikasi dan mobilitas sosial. Sejalan dengan itu, mengurangi tingkat alienasi di tempat kerja menjadi suatu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis pekerja dan secara keseluruhan, memperbaiki produktivitas kerja.

Kata kunci : *Karl Marx; kemiskinan; masalah sosial; pekerja*

The social problem of poverty in Indonesia: A theoretical view of Karl Marx

Abstract

This research aims to examine the social problem of poverty that occurs in Indonesia with a theoretical analysis of the views of Karl Marx, a classical sociological figure. This research uses a literature study method, by collecting various credible and accurate references. The results of this research show that poverty can arise from a number of factors, including low levels of education, inequality in income distribution, and constraints on access to capital. Therefore, these factors are recognized as the main causes of poverty problems. Karl Marx's theoretical perspective, which highlights the root of structural problems in capitalist economies, especially those related to the exploitation of workers and unequal distribution of wealth, can be a trigger for poverty. Efforts to overcome poverty involve several solutions, such as empowering workers through forming trade unions, reforming the economic structure by implementing progressive taxes, and reallocating economic resources to sectors that are capable of empowerment. In addition, investment in worker education and training is considered crucial for improving qualifications and social mobility. In line with this, reducing

the level of alienation in the workplace is a strategic step to improve workers' psychological well-being and overall, improve work productivity.

Keywords: *Karl Marx; poverty; social problem; worker*

Pendahuluan

Negara-negara sedang berkembang menghadapi tantangan serius, yaitu masalah kemiskinan. Tidak meratanya pembagian pendapatan menjadi pemicu ketidaksetaraan ekonomi, yang menjadi akar permasalahan kemiskinan. Jika masalah ini tidak segera ditangani, situasi dapat semakin memburuk dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas sosial dan politik (Kurniawan, 2009). Kemiskinan merujuk pada keadaan di mana individu atau keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Sementara itu, lingkungan tempat tinggal mereka tidak memberikan cukup peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan atau untuk keluar dari kondisi sulit tersebut (Adawiyah, 2020). Kemiskinan di suatu negara atau wilayah mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal di suatu wilayah atau negara (Zuhdiyaty & Kaluge, 2017). Sharp menyebut terdapat beberapa faktor menjadi pemicu munculnya masalah kemiskinan, termasuk (1) ketidaksetaraan dalam kepemilikan sumber daya yang mengakibatkan distribusi pendapatan yang tidak merata, (2) perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia, dan (3) adanya konsep lingkaran setan kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*) (Pratiwi dkk., 2022). Selain itu, jika dipandang dari berbagai aspek, secara ekonomi, masalah ini tercermin dalam keterbatasan kepemilikan alat produksi, rendahnya tingkat upah atau gaji, dan kurangnya keterampilan yang menghambat peluang pribadi untuk mengatasi kesempatan yang ada, sehingga masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak. Dari segi sosial, kendala timbul akibat kurangnya interaksi dan sosialisasi, ketidakintegrasian warga miskin ke dalam lembaga sosial, serta internalisasi budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia dan etos kerja. Kurangnya modal sosial juga berperan, menyebabkan kekurangan kepercayaan dan jaringan sosial yang terbatas. Aspek psikologis juga turut berkontribusi, mencakup rendahnya harga diri, sikap fatalistik, malas, dan perasaan terisolir. Di sisi politik, masalah muncul dari rendahnya akses terhadap kesempatan politik, adanya diskriminasi, dan keterbatasan dalam menyampaikan aspirasi serta pendapat dalam pengambilan keputusan. Dimensi politik ini mencakup ketidaktersediaan wadah organisasi yang dapat mewakili aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka (Jamaludin, 2015).

Selain itu, istilah kemiskinan yang sering diketahui yaitu budaya kemiskinan. Konsep kemiskinan budaya kadang-kadang digunakan secara terbalik sebagai budaya kemiskinan. Kemiskinan budaya merujuk pada pola hidup yang memiliki aturan dan nilai-nilai yang menganggap bahwa tingkat kehidupan miskin yang dialami oleh suatu masyarakat pada suatu periode waktu dianggap wajar dan tidak perlu diperbaiki. Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat dianggap sebagai takdir yang tak dapat diubah, sehingga manusia dan masyarakat cenderung beradaptasi dengan kondisi tersebut tanpa upaya perbaikan (Suradi, 2012), dikarenakan budaya kemiskinan ini sudah menjadi bagian dari masyarakat miskin, serta tradisi yang terus dipertahankan oleh mereka. Pola pikir ini membentuk cara hidup yang kemudian menjadi kebiasaan dalam masyarakat miskin. Oleh karena itu, nilai-nilai dan pandangan hidup yang mengakar dalam masyarakat miskin menjadi pendorong utama terbentuknya

kebudayaan kemiskinan (Mahdiyah, 2023). Budaya kemiskinan ini juga menyebabkan masyarakat seringkali tidak dapat berpartisipasi dalam lembaga sosial masyarakat karena budaya kemiskinan yang telah tertanam, yang bisa memengaruhi kualitas hidup dan semangat kerja mereka, sebagai bagian dari dimensi sosial (Rosana, 2019), sehingga dapat mempengaruhi mental dan sikap seseorang yang menyebabkan masyarakat hidup dalam taraf kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022 terkait dengan tingkat kemiskinan, bahwa dari 34 provinsi di Indonesia, 16 di antaranya memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, sedangkan 18 provinsi lainnya memiliki tingkat kemiskinan di bawah angka nasional (9,54%). Provinsi Papua memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, mencapai 26,56%, diikuti oleh Provinsi Papua Barat dengan 21,33%, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 20,05%. Di sisi lain, Provinsi Bangka Belitung memiliki tingkat kemiskinan terendah, yaitu 4,45%, diikuti oleh Provinsi Kalimantan Selatan dengan 4,49%, dan Provinsi Bali dengan 4,57% (Statistik, 2022). Pada bulan Maret 2023, dari data Badan Pusat Statistik tahun 2023 pada wilayah Indonesia berdasarkan pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, bahwa jumlah keseluruhan penduduk miskin yang ada mencapai 25,90 juta orang, mengalami penurunan sebesar 0,46 juta orang jika dibandingkan dengan bulan September 2022, serta menunjukkan penurunan sebesar 0,26 juta orang dibandingkan dengan bulan Maret 2022 dengan jabaran wilayah Pulau Maluku dan Papua memiliki persentase penduduk miskin terbesar, mencapai 19,68 persen. Sebaliknya, Pulau Kalimantan memiliki persentase penduduk miskin terendah, hanya sebesar 5,67 persen. Meskipun demikian, dari segi jumlah, mayoritas penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa, mencapai 13,62 juta orang, sementara jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, hanya 0,97 juta orang (Statistik, 2023). Sementara itu, berdasarkan persentase penduduk miskin di perkotaan dari keseluruhan dari wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua pada bulan Maret 2023 mencapai 7,29 persen, mengalami penurunan dari angka 7,53 persen pada bulan September 2022. Di sisi lain, persentase penduduk miskin di perdesaan berdasarkan keseluruhan dari wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua pada bulan Maret 2023 mencapai 12,22 persen, menurun dari angka 12,36 persen pada bulan September 2022 (Statistik, 2023). Dalam konteks penurunan jumlah penduduk miskin, data menunjukkan bahwa pada bulan Maret 2023, penduduk miskin di perkotaan mengalami penurunan sebanyak 0,24 juta orang, berkurang dari 11,98 juta orang pada bulan September 2022 menjadi 11,74 juta orang. Sementara itu, dalam periode yang sama, jumlah penduduk miskin di perdesaan menurun sebanyak 0,22 juta orang, menyusut dari 14,38 juta orang pada bulan September 2022 menjadi 14,16 juta orang pada bulan Maret 2023. Data ini mencerminkan tren penurunan angka kemiskinan di kedua lokasi tersebut dari keseluruhan wilayah di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dimana data ini memberikan gambaran terkini mengenai perkembangan kondisi sosial ekonomi penduduk di wilayah perkotaan dan perdesaan yang ada di Indonesia (Statistik, 2023). Kondisi kehidupan yang kurang sejahtera inilah dapat memiliki dampak negatif terhadap manusia. Hal ini disebabkan oleh rangkaian peristiwa kemiskinan yang dapat memicu dan menyebabkan munculnya berbagai masalah, seperti tingkat pengangguran yang tinggi, kelaparan, kurangnya pendidikan, serta tindak kriminalitas seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, pencopetan, dan

sebagainya (Kameela, 2024)). Selain itu, orang yang hidup dalam kondisi kemiskinan juga menghadapi kesulitan dalam mengakses berbagai sumber daya yang dapat membantu mereka keluar dari keadaan tersebut, seperti pengetahuan dan teknologi. Sayangnya, akses terhadap pengetahuan dan teknologi seringkali terbatas bagi orang miskin, karena untuk memperolehnya diperlukan modal yang tidak sedikit. Keterbatasan modal ini menjadikan sulit bagi mereka untuk melakukan aktivitas yang dapat membantu keluar dari kemiskinan. Bahkan, memenuhi kebutuhan sehari-hari saja menjadi tantangan berat, mengingat orang miskin biasanya bekerja di sektor-sektor dengan tingkat keuntungan yang rendah, yang membuat sulit bagi mereka untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka (Rosana, 2019), sehingga kemiskinan adalah suatu isu kompleks dan bersifat multidimensional yang tidak boleh disepelekan (Jamaludin, 2015).

Kemiskinan dapat terjadi karena kurangnya investasi pada modal manusia, seperti kurangnya pelatihan, pendidikan, dan kemampuan membangun, serta kekurangan modal fisik, dan penyebab kemiskinan dari perspektif ekonomi dapat diidentifikasi lebih lanjut. Pertama, tingkat mikro kemiskinan disebabkan oleh kepemilikan sumber daya yang tidak merata, yang menghasilkan ketidaksetaraan distribusi pendapatan. Kedua, kemiskinan timbul dari disparitas kualitas sumber daya manusia. Ketiga, kemiskinan muncul karena perbedaan akses terhadap modal (Okuputra & Nasikh, 2022). Secara khusus, terdapat faktor-faktor tertentu menjadi penyebab kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, disebutkan bahwa keterbatasan sumber daya alam, modal yang terbatas, kurangnya lapangan kerja, tingkat pendidikan yang rendah, kurang motivasi untuk bekerja, dan beban keluarga merupakan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia (Itang, 2015). Inflasi, konsumsi, tingkat pendapatan perkapita, dan tingkat pendidikan yang terukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara bersama-sama juga memengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia (Pratama, 2014). Meskipun demikian, perlu terus diawasi dan dievaluasi untuk memastikan keberlanjutan tren penurunan kemiskinan ini. Dengan demikian, data ini menjadi dasar yang kuat untuk menyusun strategi kebijakan yang lebih efektif guna mencapai target penurunan kemiskinan yang berkelanjutan di masa mendatang.

Secara kajian sosiologis, kita dapat menelaah salah satu tokoh sosiologis pada masanya yaitu Karl Marx. Karl Marx, yang lahir dalam lingkungan keluarga Yahudi, menyaksikan secara langsung eksploitasi yang dialami oleh kaum buruh dari tangan kaum kapitalis. Pengalaman ini menjadi pendorong utama bagi Karl Marx untuk memulai analisis kritisnya terhadap sistem kapitalisme (Kambali, 2020). Penindasan dalam konsep Marx merujuk pada perilaku eksploitatif ekonomis, di mana manusia dianggap sebagai objek yang dimanfaatkan semata-mata untuk kepentingan tertentu. Marx mengaitkan erat penindasan dengan kemiskinan, menganggap bahwa orang jatuh ke dalam kemiskinan sebagai hasil dari tindakan-tindakan penindasan yang biasanya dilakukan oleh kaum kapitalis. Dalam pandangan Marx, ekonomi kapitalis disorot sebagai penyebab kuat kemiskinan dalam masyarakat. Marx menuduh bahwa kemiskinan muncul akibat struktur ekonomi yang menindas yang sengaja dibentuk oleh para kapitalis untuk memperbesar modal mereka (Bahtiyar dkk., 2015). Hal inilah yang menimbulkan kesenjangan di masyarakat dan menjadi masalah kemiskinan di masyarakat. Gambaran kesenjangan tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat jelas, di mana sebagian penduduk hidup dalam kekayaan berlimpah, sedangkan sebagian lainnya menghadapi kekurangan. Kekayaan bagi sekelompok orang menjadi tanda

kemiskinan bagi yang lain. Tingkat ketidaksetaraan yang luar biasa dan relatif memiliki potensi risiko yang signifikan dalam masyarakat (Syawie, 2011).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Rangkaian penelitian ini merujuk pada masalah sosial dalam kemiskinan yang dianalisis melalui lensa teori konflik Karl Marx, fokusnya adalah mengamati dimensi sosiologi. Kegiatan studi kepustakaan dilakukan untuk mendukung pengumpulan literatur terkait masalah sosial dalam kemiskinan, yang menjadi sumber referensi penelitian ini. Materi yang termasuk di dalamnya mencakup dukungan argumentasi, teori-teori, temuan, serta bukti-bukti empiris seperti berita atau majalah yang relevan dan akurat.

Dalam proses penelitian, peneliti mencari informasi melalui telaah literatur yang terkait dengan masalah kemiskinan, serta menelusuri literatur atau informasi yang berkaitan dengan kasus kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Peneliti mengidentifikasi fenomena terkait kemiskinan, membentuk pertanyaan penelitian sejalan dengan kajian teori konflik Karl Marx, yang melibatkan aspek kemiskinan, penyebabnya, hingga dampak yang ditimbulkannya. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan informasi dari berbagai sumber digunakan untuk triangulasi data, meningkatkan validitas temuan (Denzin, 2009). Informasi awal yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut digabungkan dengan informasi terkait perundangan di Indonesia, termasuk melalui media sosial dan berita. Penulis telah memperoleh pemahaman awal yang bermanfaat dalam memandu penelitian ini.

Pembahasan fokus pada tiga aspek utama, kemiskinan dan mekanismenya, pandangan teoritis Karl Marx, dan solusi serta implikasi kebijakannya, semuanya dianalisis dengan menggunakan teori Konflik Karl Marx. Pengumpulan data didukung oleh studi literatur (dokumen) (Sukmadinata, 2009), terutama untuk menangkap informasi seputar masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Keseluruhan data kemudian dianalisis menggunakan pengkodean data (Sugiyono, 2013), melalui proses koding, pembacaan ulang, dan pengelompokan temuan untuk mendapatkan kategorisasi data yang sesuai. Pembatasan kajian dilakukan sesuai dengan tujuan untuk mengungkapkan esensi kemiskinan, mekanisme terjadinya, serta dampaknya, semuanya dianalisis dengan kerangka teori konflik Karl Marx.

Hasil dan Pembahasan

1. Kemiskinan: definisi dan penyebab

Masalah kemiskinan adalah isu yang sangat kompleks dan memiliki dampak signifikan terhadap kemajuan suatu negara (Ahmad, 2020). Kemiskinan dijelaskan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Definisi kemiskinan ketidakmampuan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan (Bolung & Malau, 2022). Kemiskinan dimaksud sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang mengalami kekurangan harta atau barang berharga. Kekurangan ini menyebabkan mereka merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka secara memadai. Kekurangan tersebut bisa bersifat budaya (misalnya adat, upacara, moral, dan etika),

sosial (seperti pendidikan, komunikasi, dan interaksi antar sesama), atau kebutuhan dasar (seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan). Dengan demikian, kemiskinan mencerminkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan untuk kesejahteraan individu (Arifin, 2020).

Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan kemiskinan adalah kondisi di mana individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan untuk hidup yang layak, baik itu kebutuhan akan makanan maupun kebutuhan non-pangan (Azahari, 2020). Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai keadaan mutlak dan relatif yang menyebabkan individu atau kelompok dalam suatu wilayah tidak memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor alami, budaya, dan struktural (Aprianto, 2018). Kemiskinan juga merujuk pada kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang layak. Faktor-faktor seperti ketidakmampuan mendapatkan pekerjaan karena alasan kesehatan, pendidikan, kecacatan, dan sebagainya dapat menjadi penyebab dari ketidakmampuan tersebut (Chaniago, 2015). Kemiskinan timbul karena beberapa alasan, seperti gaji minimum yang tidak mencukupi, kualitas hidup yang rendah, dan peningkatan angka pengangguran setiap tahun tanpa penambahan lapangan pekerjaan yang cukup (Priseptian & Primandhana, 2022). Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh kurangnya kualitas sumber daya manusia, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, kurangnya motivasi, pandangan yang negatif terhadap hubungan keluarga yang menilai orang tua sebagai beban, terbatasnya pilihan pekerjaan yang layak dengan gaji rendah dan jam kerja yang panjang, serta kurangnya kreativitas (Adawiyah, 2020). Kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah terjadi akibat faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosial seperti kekurangan keterampilan, kurangnya kemampuan intelektual, atau kondisi fisik yang lemah. Kemiskinan juga dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis diantaranya yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut terjadi ketika mayoritas penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sementara itu, kemiskinan relatif disebabkan oleh ketidakseimbangan ekonomi yang berkontribusi pada kesenjangan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Sinurat, 2023). Lingkungan fisik juga dapat menjadi hambatan bagi individu untuk berusaha atau bekerja. Di sisi lain, kemiskinan struktural terkait dengan ketidakadilan dalam perbandingan nilai pertukaran (terms of trade) antara hasil produksi yang dijual oleh penduduk miskin dan nilai barang serta jasa yang harus mereka beli. Disparitas ini juga muncul melalui ketidakadilan dalam pembayaran jasa pekerja, seperti upah yang rendah dan eksploitasi, serta pemberlakuan pungutan yang memberatkan dan cenderung mengeksploitasi penduduk miskin (Fahmi dkk., 2018).

Ketidakmampuan ekonomi atau kemiskinan dapat diperhatikan melalui perspektif tertentu, salah satunya adalah ketidaksetaraan sosial. Fenomena ini muncul ketika ada individu yang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar minimalnya, namun pendapatannya masih signifikan lebih rendah dibandingkan dengan anggota masyarakat di sekitarnya. Semakin besar disparitas pendapatan antara kelompok atas dan bawah, semakin tinggi jumlah penduduk yang tergolong miskin. Dengan demikian, kemiskinan relatif erat kaitannya dengan isu distribusi pendapatan ((Budhi & Kembar, 2013). Selain isu distribusi pendapatan, pandangan konsep kemiskinan tersebut memperluas cakupan ilmu sosial terhadap kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan

pokok. Lebih dari itu, konsep ini juga mencakup kondisi ketidakberdayaan yang muncul akibat kualitas kesehatan dan pendidikan yang rendah, perlakuan hukum yang tidak adil, rentan terhadap tindak kejahatan (kriminal), risiko mendapatkan perlakuan negatif secara politik, dan terutama ketidakmampuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan sendiri (Jacobus dkk., 2021). Apabila dilihat dari beberapa perspektif, akar penyebab kemiskinan dapat dianalisis dari perspektif ekonomi, terutama pada tingkat mikro. Pertama, kemiskinan timbul karena tidak meratanya pola kepemilikan sumber daya, yang menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak seimbang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya terbatas dengan kualitas rendah. Kedua, kemiskinan muncul karena disparitas dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas rendah pada sumber daya manusia mengakibatkan produktivitas yang rendah dan, sebagai hasilnya, upah yang rendah. Faktor-faktor seperti pendidikan yang rendah, ketidakberuntungan, diskriminasi, atau keturunan dapat menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Terakhir, ketidaksetaraan akses terhadap modal juga menjadi penyebab ketiga kemiskinan (Akhmad, 2021). Orang yang mampu memenuhi hak-hak dasar dianggap tidak mengalami kemiskinan, sementara mereka yang tidak dapat melakukannya dikategorikan sebagai miskin. Meskipun kenyataannya, standar hidup yang layak berbeda-beda untuk setiap individu, bergantung pada faktor seperti usia, lokasi tempat tinggal, dan lain-lain. Kemiskinan memiliki bentuk yang kompleks, termasuk rendahnya pendapatan dan sumber daya produktif yang dapat menjamin kehidupan yang berkelanjutan, kelaparan dan kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan, keterbatasan dan kurangnya akses ke pendidikan serta layanan pokok lainnya, keadaan tak wajar, peningkatan kematian akibat penyakit, kehidupan yang tidak menetap dan tempat tinggal yang tidak memadai, lingkungan yang tidak aman, dan juga diskriminasi serta isolasi sosial (Murdiansyah, 2014).

2. Pandangan teoritis Karl Marx

Karl Marx, sebagai seorang filosof, ekonom, dan sosiolog, mengembangkan teori konflik yang menyoroti ketidaksetaraan dan konflik kelas dalam masyarakat kapitalis. Bagi Marx, kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai kekurangan materi, tetapi juga sebagai hasil dari struktur sosial ekonomi yang mendominasi dalam masyarakat. Marx menilai bahwa struktur ekonomi kapitalis menjadi akar utama kemiskinan. Di Indonesia, dapat dilihat bagaimana sejumlah kekayaan terkonsentrasi pada sekelompok kecil individu atau kelompok. Kondisi ini menciptakan jurang ekonomi yang lebar antara pemilik modal dan pekerja, yang merupakan akar dari ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan.

Konsep eksploitasi pekerja dan surplus nilai adalah pokok dalam teori Marx. Pemilik modal dalam sistem kapitalis cenderung mengeksploitasi pekerja dengan memaksimalkan surplus nilai, yaitu perbedaan antara nilai yang dihasilkan oleh pekerja dan nilai upah yang mereka terima. Di Indonesia, seringkali terlihat dampaknya pada kondisi kerja di berbagai sektor. Upah pekerja seringkali tidak sebanding dengan nilai ekonomi yang dihasilkan, menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan meningkatkan tingkat kemiskinan di kalangan pekerja. Konsep alienasi dalam teori Marx menjelaskan perasaan terasing yang dialami pekerja terhadap hasil kerja mereka dan keputusan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks kemiskinan di Indonesia, alienasi ini dapat dilihat dalam rendahnya tingkat kepuasan kerja, kurangnya motivasi, dan rasa tidak memiliki kendali atas nasib ekonomi mereka. Penelitian empiris

menunjukkan bahwa tingkat alienasi yang tinggi dapat menjadi faktor kontributor terhadap masalah psikologis dan rendahnya kesejahteraan mental di kalangan pekerja. Ini menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan, tetapi juga memberikan dampak negatif pada produktivitas dan kesejahteraan umum pekerja. Marx membagi masyarakat menjadi dua kelas utama: kapitalis (pemilik modal) dan proletariat (pekerja). Pandangan kelas sosial ini sangat relevan dalam konteks kemiskinan di Indonesia. Distribusi kekayaan yang tidak merata antara kelas-kelas sosial suini menjadi pemicu ketidaksetaraan dan kemiskinan.

3. Solusi dan implikasi kebijakan

Pandangan teoritis Karl Marx mengenai kemiskinan memberikan landasan yang kuat untuk merumuskan solusi dan kebijakan yang dapat mengatasi masalah kompleks ini di Indonesia. Marx, sebagai tokoh teori konflik, menyoroti akar masalah struktural dalam masyarakat kapitalis yang menjadi pemicu ketidaksetaraan ekonomi. Pentingnya pemberdayaan pekerja sebagai langkah kunci dalam mengatasi kemiskinan tidak dapat dipandang mudah. Peningkatan hak pekerja dan pemberdayaan melalui pembentukan serikat pekerja dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil. Langkah-langkah ini mencakup perluasan hak pekerja, termasuk hak untuk berserikat dan berunding secara kolektif, serta penerapan standar kerja yang layak. Dengan memberikan kekuatan kepada pekerja, masyarakat dapat mengurangi tingkat eksploitasi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja secara keseluruhan. Selain itu, pemberdayaan pekerja juga melibatkan peningkatan partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan di tempat kerja. Keterlibatan pekerja dalam proses pengambilan keputusan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih demokratis, di mana keputusan yang diambil memperhatikan kepentingan kolektif. Ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja secara ekonomi, tetapi juga memberikan rasa memiliki dan kepuasan kerja yang lebih tinggi.

Reformasi struktur ekonomi menjadi langkah kritis dalam menanggulangi ketidaksetaraan ekonomi yang menjadi akar dari kemiskinan. Kebijakan yang menargetkan peningkatan pajak bagi kelompok berkeuntungan dapat membantu mengurangi akumulasi kekayaan yang tidak merata. Pajak progresif yang memberikan beban yang lebih besar kepada mereka yang memiliki kekayaan yang lebih besar dapat menciptakan sumber daya untuk membiayai program-program kesejahteraan dan proyek-proyek infrastruktur yang mendukung masyarakat. Pentingnya realokasi sumber daya ekonomi untuk mendukung sektor-sektor yang memberdayakan masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Investasi dalam sektor-sektor seperti pertanian kecil, industri kreatif lokal, dan usaha mikro dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan peluang ekonomi bagi kelompok yang kurang beruntung. Reformasi ini harus melibatkan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memastikan implementasinya secara efektif.

Investasi dalam pendidikan dan pelatihan pekerja menjadi strategi yang sangat penting untuk mengatasi kemiskinan. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kualifikasi pekerja, membuat mereka lebih siap menghadapi persaingan di pasar tenaga kerja. Kebijakan pendidikan yang inklusif dan berfokus pada pengembangan keterampilan dapat membantu mengurangi kesenjangan kualifikasi dan meningkatkan mobilitas sosial. Selain itu, program pelatihan yang berkelanjutan dapat memberikan pekerja dengan keterampilan yang diperlukan dalam ekonomi yang terus berubah.

Inisiatif ini dapat melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa kurikulum dan pelatihan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Alienasi di tempat kerja dapat merugikan kesejahteraan psikologis pekerja dan produktivitas keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang bertujuan mengurangi tingkat alienasi di tempat kerja menjadi kunci dalam upaya mengatasi kemiskinan. Peningkatan partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih demokratis dan memberikan pekerja rasa memiliki terhadap hasil kerja mereka. Selain itu, penciptaan lingkungan kerja yang mendukung, di mana nilai-nilai seperti keadilan, partisipasi, dan saling mendukung dihargai, dapat mengurangi tingkat alienasi. Program-program pelatihan untuk manajemen yang bertujuan menciptakan kepemimpinan yang inklusif dan berempati juga dapat membantu menciptakan tempat kerja yang lebih manusiawi.

Simpulan

Kemiskinan dapat terjadi dari berbagai faktor seperti pendidikan rendah, ketidaksetaraan distribusi pendapatan, dan keterbatasan akses terhadap modal sehingga diidentifikasi sebagai penyebab utama kemiskinan. Pandangan teoritis Karl Marx yang menyoroti akar masalah struktural ekonomi kapitalis, terutama terkait eksploitasi pekerja dan ketidaksetaraan distribusi kekayaan dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Solusi yang diusulkan untuk mengatasi kemiskinan mencakup pemberdayaan pekerja melalui pembentukan serikat pekerja, reformasi struktur ekonomi dengan penerapan pajak progresif, dan realokasi sumber daya ekonomi untuk sektor-sektor yang memberdayakan. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan pekerja dianggap kunci untuk meningkatkan kualifikasi dan mobilitas sosial, sementara upaya mengurangi tingkat alienasi di tempat kerja dianggap vital untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis pekerja dan produktivitas keseluruhan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemberdayaan pekerja, reformasi struktur ekonomi, dan investasi dalam pendidikan menjadi langkah-langkah kunci untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. dan statistik bahwa kesempatan mereka untuk menang tidak besar.

Daftar Pustaka

- Adawiyah, S. d. E. (2020). Kemiskinan dan Faktor-Faktor Penyebabnya. *Journal of Social Work and Social Service*, 43.
- Ahmad, Z. (2020). Definisi dan Konsep Kemiskinan Bandar: Satu Kajian Literatur. *Persidangan Antarabangsa Sains Sosial Dan Kemanusiaan Ke-5*, 634-641.
- Akhmad, K. A. (2021). Peran pendidikan kewirausahaan untuk mengatasi kemiskinan. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(06), 173-181.
<http://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/419>
- Aprianto, N. E. K. (2018). Kemiskinan dalam perspektif ekonomi politik Islam. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2).
<http://journal.islamiconomic.or.id/index.php/ije/article/view/60>

- Arifin, J. (2020). Budaya kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 6(2), 114-132.
<http://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/2372>
- Azahari, R. (2020). Pengaruh Kemiskinan Dan Pendidikan Terhadap Kesehatan Masyarakat. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 8(1), 56-63.
<https://equity.ubb.ac.id/index.php/equity/article/view/14>
- Bahtiyar, E., Mu'inudinillah, M. M. i. M., & Hidayat, S. (2015). Kritik Islam Terhadap Konsep Marxisme Tentang Pengentasan Kemiskinan. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 16(2), 127-135.
<https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/1846>
- Bolung, D., & Malau, N. A. (2022). Analisis Dampak Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kawiley Kecamatan Kauditan. *Jurnal Equilibrium*, 3(2), 64-71.
<http://ejournal.unima.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/3490>
- Budhi, S., & Kembar, M. (2013). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di bali: analisis FEM data panel. *Jurnal Ekonomi kuantitatif terapan*, 6(1), 44289.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/download/4506/3435>
- Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 47-56. <https://ejournal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/7099>
- Denzin, N. K. (2009). Apocalypse now: Overcoming resistances to qualitative inquiry. *International Review of Qualitative Research*, 2(3), 331-343.
- Fahmi, G. R. A., Setyadi, S., & Suiro, U. (2018). Analisis strategi penanggulangan kemiskinan di provinsi banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 8(2).
<http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu/article/view/4450>
- Itang, I. (2015). Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 16(01), 1-30.
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/206>
- Jacobus, E. H., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan rumah tangga di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(3), 86-103.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/32744>
- Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi perkotaan: memahami masyarakat kota dan problematikanya*. Pustaka Setia.
- Kambali, M. (2020). Pemikiran Karl Marx tentang struktur masyarakat (Dialektika infrastruktur dan suprastruktur). *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 8(2), 63-80. <https://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/download/154/111/>

- Kameela, I. A. (2024). *PENERAPAN LIU ESTIMATOR PADA REGRESI BINOMIAL NEGATIF UNTUK MENGIDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR KRIMINALITAS DI JAWA TIMUR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA*.
- Kurniawan, D. (2009). Kemiskinan di Indonesia dan solusinya. *Gema Eksos*, 5(1), 1-18.
<https://e-jurnal.unisfat.ac.id/index.php/ge/article/download/39/36>
- Mahdiyah, N. (2023). STUDI LITERATUR KEBUDAYAAN KEMISKINAN PADA PENGEMIS DI PERKOTAAN. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 47-55.
<https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/4020>
- Murdiansyah, I. (2014). Evaluasi program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat: Studi kasus pada program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang. *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 4(1), 71-92.
<http://ejournal.itbwigalumajang.ac.id/index.php/wiga/article/view/119>
- Okuputra, M. A., & Nasikh, N. (2022). Pengaruh inovasi daerah terhadap kemiskinan. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 18(1), 159-166.
<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/10379>
- Pratama, Y. C. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(2).
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/view/1966/0>
- Pratiwi, S. A., Noorsyarifa, G. C., & Apsari, N. C. (2022). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekonomi di Indonesia Melalui Perspektif Pekerja Sosial. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(1), 72-82.
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*,
- Rosana, E. (2019). Kemiskinan Dalam Perspektif Struktural Fungsional. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14(1), 19-34.
- Statistik, B. P. (2022). Persentase penduduk miskin (P0) menurut provinsi dan daerah 2021-2022. *Jakarta: BPS*.
- Statistik, B. P. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020* (Vol. 7). Badan Pusat Statistik
- Sugiyono, S. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Suradi, S. (2012). Pendekatan Kelompok Sebagai Modalitas Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 17(2).
<http://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/93/61>

- Syawie, M. (2011). Kemiskinan dan kesenjangan sosial. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 16(3). <https://e-journal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/47/17>
- Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia selama lima tahun terakhir. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(2), 27-31.
<http://jurnal.stie.asia.ac.id/index.php/jibeka/article/view/42>